

## BAB II KAJIAN TENTANG PERUSAHAAN

### 2.1. Deskripsi Umum Perusahaan

Mitra merupakan salah satu Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang merupakan salah satu dari 6 Unit Kerja Wilayah dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya, Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak menutup kemungkinan untuk dapat berkolaborasi dengan UKPD lainnya yang ada dalam satu wilayah kerja.

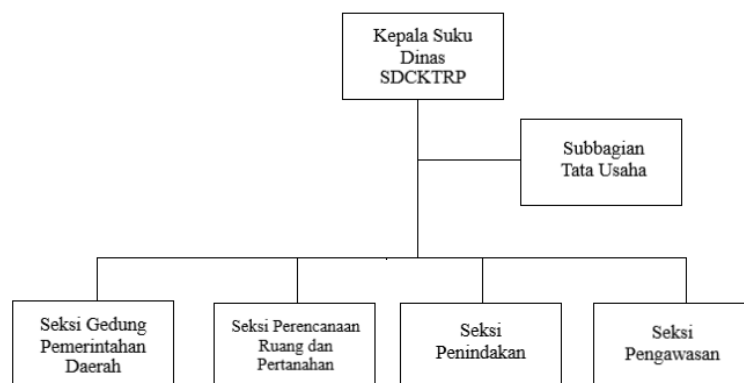
Fokus bidang mitra dijelaskan pada Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 279 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, “Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan ruang, pertanahan, bangunan gedung, dan penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Administrasi.” Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
- c. penyusunan bahan evaluasi rencana tata ruang; dst.

Secara umum, Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan memiliki 2 Seksi yang terjun langsung dalam dunia perarsitekturan dan juga arsitektur kota. Seksi Gedung Pemerintahan Daerah bertugas dalam mereview dan membangun bangunan-bangunan dan fasilitas pemerintahan sedangkan Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan berfokus pada perancangan wilayah secara makro. Selain itu, terdapat juga 2 Seksi yang terjun langsung ke lapangan, yaitu Seksi Penindakan dan Seksi Pengawasan. Seksi Penindakan bertugas untuk menindaklanjuti proyek yang akan dijalankan baik oleh Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan maupun Seksi Gedung Pemerintahan Daerah. Seksi Pengawasan memiliki tugas untuk mengawasi pekerjaan dari Seksi Penindakan.

### 2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan Organisasi Suku Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
*Sumber: Dokumen pribadi*

Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dikepalai oleh Bapak Zulkifli Zanti Arbi. Kemudian untuk masing-masing posisi memiliki pemimpinnnya masing-masing, Bapak Sudjarwoko selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Joni Setiawan selaku Kepala Seksi Perencanaan Ruang Dan Pertanahan, Ibu Lia Rosiana selaku Kepala Seksi Gedung Pemerintah Daerah, Bapak Nurhidayat Budi Handoko selaku Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan, dan Bapak Syahrudin selaku Kepala Seksi Penindakan.

### 2.3. Administrasi Perusahaan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang berada pada tingkat Provinsi sebagai induk dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang ada pada tingkat Kota Administrasi secara umum dan Kota Administrasi Jakarta Pusat khususnya dalam laporan ini, memiliki dasar pembentukan berupa Peraturan Gubernur. Dasar Pembentukan tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bab II, Pasal (7), Poin (e) yang berbunyi, “Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;”.

Kemudian untuk lebih rincinya, fokus bidang Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dijelaskan pada Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 279 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, “Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan ruang, pertanahan, bangunan gedung, dan penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Administrasi.” Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
- c. penyusunan bahan evaluasi rencana tata ruang; dst.

Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Sebagai contoh dalam perancangan gedung kantor Satpol PP Kebon Sirih, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melalui Seksi Gedung Pemda melakukan kerja sama dengan PT. Tiramatsi Utama. PT. Tiramatsi Utama merupakan anggota asosiasi INKINDO DKI Jakarta dengan nomor anggota 09075/P/1819.DKI. Dalam pelaksanaannya, PT. Tiramatsi Utama merupakan pihak yang menjalankan proyek dan pihak dinas berperan sebagai pengawas dan memberikan evaluasi.

Selain dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan luar, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugasnya juga dapat melakukan perekrutan tenaga ahli atau *Assistant Professional Staff* (APS) dengan sistem kontrak individu. Contoh perekrutan APS dapat dilihat pada pengumuman nomor 24/PPBJ/SDCKTRPJP/II/2022, dalam pengumuman tersebut menyampaikan seleksi penerimaan APS yang terbuka untuk jurusan arsitektur dan planologi. Dalam perekrutan tersebut tidak mengharuskan pelamar untuk memiliki sertifikat keahlian, tetapi menyebutkan mengutamakan pemilik sertifikat keahlian di bidangnya.

## 2.4. Lingkup Kerja Perusahaan

Fokus bidang pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan berfokus pada perencanaan bangunan, fasilitas publik dan juga penataan kawasan. Proyek-proyek tersebut didapatkan berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kota yang disepakati bersama melalui beberapa usulan dari kelurahan. Lalu, usulan yang diterima dikaji kembali dan dikoordinasikan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tingkat provinsi untuk direalisasikan.

Salah satu proyek yang telah dikerjakan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Penataan Kawasan Petojo Enclek. Kawasan Petojo Enclek dinilai cukup kumuh walaupun terdapat beberapa bangunan cagar budaya di sekitarnya seperti Pasar Petojo Enclek dan juga Museum Prasasti. Selain itu, terdapat Kantor Walikota Jakarta Pusat di kawasan Petojo Enclek. Oleh karena itu, dilakukan penataan kembali Kawasan Petojo Enclek menjadi lebih asri dan rapih mulai dari penataan jalur pedestrian, penataan sirkulasi kendaraan, serta penambahan wayfinding, bollard, dan beberapa street furniture pendukung.



**Gambar 2.2** Perspektif eksisting kawasan Petojo Enclek  
*Sumber: Youtube DCKTRP, 2020*



**Gambar 2.3** Rancangan desain kawasan Petojo Enclek  
*Sumber: Youtube DCKTRP, 2020*

Proyek lainnya yang dikerjakan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah penataan Kawasan Waduk Melati. Kawasan Waduk Melati sebelumnya terkesan kumuh dan terdapat banyak PKL liar yang berjualan di sembarang tempat, sehingga mengganggu sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan. Oleh karena itu, dilakukannya penataan PKL yang telah terdaftar resmi dan juga penambahan beberapa taman-taman resapan untuk menambah estetika dari Kawasan Waduk Melati.



**Gambar 2.4** Perspektif sebelum dan sesudah kawasan Kebon Kacang Raya  
*Sumber: Youtube DCKTRP, 2020*